



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

## TAHUN 2023

**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 741964 - 741803 - 741807 Fax. (0541) 736003  
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com

**SAMARINDA**

## **IKTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim tahun 2019–2023 didukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2020–2024, RTRWP tahun 2016–2036, KLHS tahun 2019–2023, dan TPB/SDGs, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah:

### **“Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah “**

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada P-RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam P-Renstra.

Selanjutnya pada P-RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2023 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu “ **Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan**” dengan indikator Jumlah Penerimaan PNBP sektor Kehutanan (Rupiah).

Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis cukup berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Rp125.000.000.000 dan realisasi Rp272.627.421.133 dengan rasio capaian sebesar 218,10%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

**H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750807200031003

## DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Aparatur .....	5
E. Aspek Strategis .....	7
F. Permasalahan Utama .....	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah .....	20
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Perencanaan Strategis .....	21
B. Indikator Kinerja Utama.....	27
C. Perjanjian Kinerja.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>30</b>
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya .....	30
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	36
C. Analisis Capaian kinerja .....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Struktur Organisasi Dinas .....	5
Gambar I-2. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur .....	11

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Sumber Daya Aparatur .....	6
Tabel I-2.	Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur .....	13
Tabel I-3.	Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur .....	13
Tabel I-4.	Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan .....	14
Tabel I-5.	Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	15
Tabel I-6.	Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2023 .....	17
Tabel I-7.	Data Kerusakkan Hutan Tahun 2023 .....	19
Tabel I-8.	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2023 .....	20
Tabel II-1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (P-Renstra 2019-2023) .....	22
Tabel II-2.	Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program/kegiatan serta penyajian IKU.....	23
Tabel II-3.	Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran.....	23
Tabel II-4.	Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel II-5.	Perjanjian Kineja Tahun 2023 (Sasaran Srategis) .....	29
Tabel II-6.	Perjanjian Kineja Tahun 2023 (Program) .....	29
Tabel III-1.	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	30
Tabel III-2.	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP .....	30
Tabel III-3.	Pengukuran Capaian Kerja .....	36

Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Tahun 2023 .....	36
Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya .....	37
Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 .....	37
Tabel III-7. Effesiensi penggunaan sumber daya.....	38
Tabel III-8. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	41
Tabel III-9. Realisasi Anggaran Sesuai dengan perjanjian Kinerja.....	53
Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023, Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, secara lebih detil, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan

ekosistemnya;

- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Cabang Dinas;
- k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan dan menetapkan standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

- g. merumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan, produksi dan pemanfaatan hutan, peredaran dan industri hasil hutan dan perlindungan hasil hutan berdasarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi bidang kehutanan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- i. melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dalam sebuah organisasi. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan berdasarkan fungsi antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan, memiliki hirarki yang jelas dan melahirkan tingkatan personil dalam suatu organisasi.

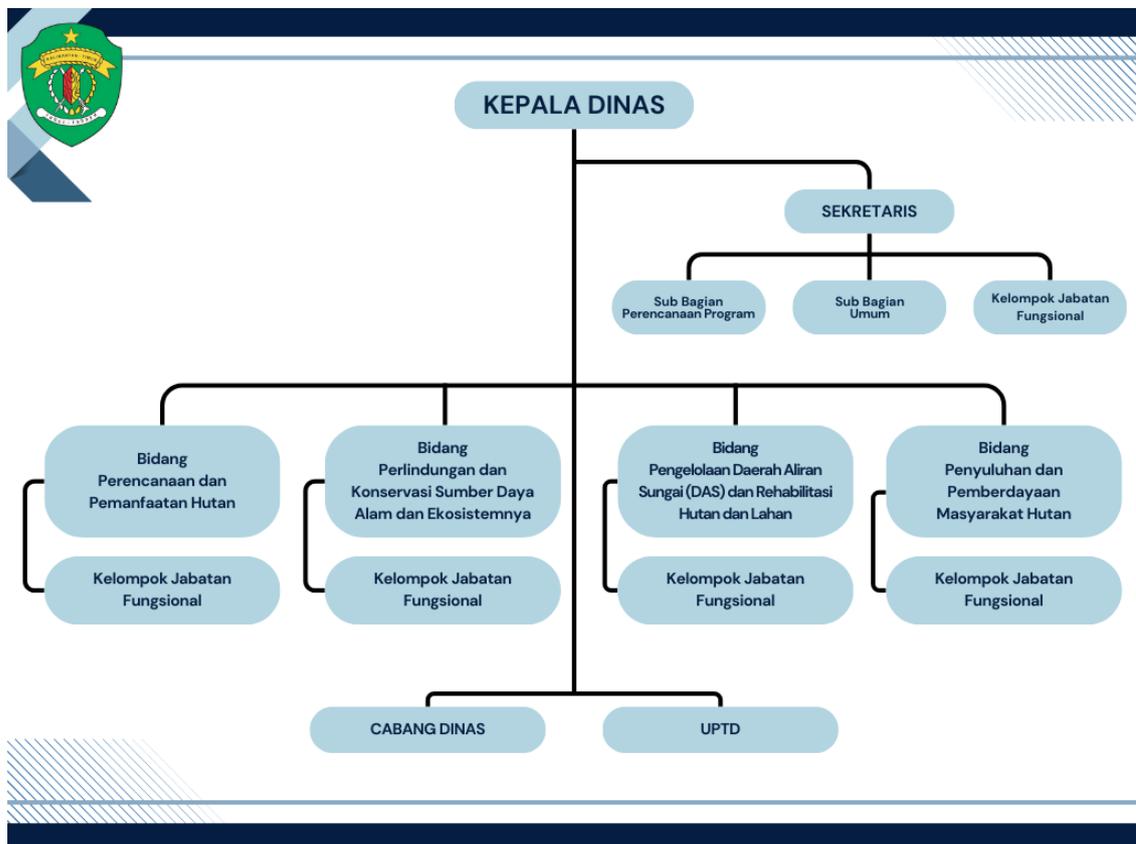
Secara susunan organisasi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun

2023, serta pembentukan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 , Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Dinas, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan Program;
  - 2) Subbagian Umum; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
- d. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
- e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
  - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (TujuhBelas):
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake;
    - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo.

- 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Terdiri dari atas 2 (dua) UPTD, yaitu:
  - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
  - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
- 3) UPTD Taman Hutan raya Bukit Soeharto

Berdasarkan garis hirarki dan tingkatan personil dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



GAMBAR I-1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 603 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM

tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 12,27% berpendidikan S2; 40,13 % berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3, D2 (Sarjana Muda) 11,61 %; 33,00 % berpendidikan SLTA dan 1,99 % berpendidikan SLTP serta 1,00 % berpendidikan SD.

Tabel I-1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	3	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12	1	9	3	-	-	9	3	-	-	-	-
	Pelaksana Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	94	29	6	92	25	-	8	60	5	49	1	-
2	Kepala UPTD KPHP Batu Ayau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Ayau	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Ayau	11	2	-	8	5	-	-	5	4	4	-	-
3	Kepala UPTD KPHP Bengalon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bengalon	2	1	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bengalon	12	7	-	14	5	-	2	10	2	4	1	-
4	Kepala UPTD KPHP Berau Barat	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTDKPHP Berau Barat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Barat	10	2	-	6	5	1	-	4	1	6	-	1
5	Kepala UPTD KPHP Bongon	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Bongon	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Bongon	15	5	-	15	5	-	1	2	4	12	1	-
6	Kepala UPTD KPHP DAS Belayan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP DAS Belayan	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP DAS Belayan	16	4	-	15	5	-	1	8	2	9	-	-
7	Kepala UPTD KPHP Kendilo	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kendilo	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kendilo	14	4	-	14	3	1	-	7	1	9	-	1
8	Kepala UPTD KPHP Meratus	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Meratus	2	1	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Meratus	21	9	1	16	13	-	1	10	2	16	1	-
9	Kepala UPTD KPHP Santan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Santan	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Santan	27	4	1	22	8	-	1	8	3	18	1	-
10	Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD Tahura Bukit Soeharto	41	12	-	45	7	1	1	20	15	16	-	1
11	Kepala UPTD KPHP Damai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Damai	2	1	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Damai	15	3	-	12	6	-	2	7	2	7	-	-
12	Kepala UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
	Pelaksana UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn	11	5	-	14	2	-	1	9	1	5	-	-
13	Kepala UPTD KPHP Batu Rook	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Batu Rook	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Batu Rook	11	2	-	10	3	-	1	7	-	5	-	-
14	Kepala UPTD KPHP Berau Utara	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Utara	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Utara	8	1	-	7	1	1	-	1	3	4	1	-
15	Kepala UPTD KPHP Berau Tengah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Tengah	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Tengah	9	-	-	7	2	-	-	-	6	2	1	-
16	Kepala UPTD KPHP Berau Pantai	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Berau Pantai	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Berau Pantai	9	2	-	7	4	-	-	3	2	4	2	-
17	Kepala UPTD KPHP Telake	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Telake	3	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Telake	10	2	-	6	6	-	-	6	5	1	-	-
18	Kepala UPTD KPHP Manubar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Manubar	3	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Manubar	14	5	-	15	4	-	1	10	2	6	-	-
19	Kepala UPTD KPHP Kelinjau	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Kelinjau	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Kelinjau	13	7	-	18	2	-	1	11	1	8	-	-
20	Kepala UPTD KPHL Balikpapan	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHL Balikpapan	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHL Balikpapan	15	1	-	14	-	2	-	5	2	7	-	2
21	Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi UPTD KPHP Delta Mahakam	3	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	Pelaksana UPTD KPHP Delta Mahakam	23	6	-	22	7	-	1	11	7	9	-	1
<b>J U M L A H</b>		<b>478</b>	<b>125</b>	<b>58</b>	<b>418</b>	<b>121</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>242</b>	<b>70</b>	<b>199</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>603</b>											

## E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

### 1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah Pengetahuan/masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. selama kurun waktu tertentu Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

**F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Kaltim tahun 2019–2023 didukung dengan telaahan terhadap Renstra KLHK tahun 2020–2024, RTRWP tahun 2016–2036, KLHS tahun 2019–2023, dan TPB/SDGs, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah :

**“Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah ”**

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kaltim maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi antara lain adalah :

**1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan**

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan.

**Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu.** Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai

kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil penebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP-kan. Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.

**Kedua, pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri.** Sebuah fakta, bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

**Ketiga, mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu.** Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBP.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target di dalam RENSTRA.

**Keempat, memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak.** Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).



Gambar I-2. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur  
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2023)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi open access.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan

operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP). Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

**2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan**

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 13,911 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2023, seluas 247.968 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 2 di bawah ini.

**Tabel I-2. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	24.980	16.476	182	2.614	44.251

No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
2	Kota Balikpapan	1.370	140	-	-	1.510
3	Kutai Barat	297	7.294	-	5.081	12.672
4	Kutai Kartanegara	2.443	40.583	1.815	26.763	71.603
5	Kutai Timur	11.436	16.377	125	9.772	37.711
6	Mahakam Ulu	11.741	6.924		15.842	34.508
7	Paser	3.939	12.294	3.422	23.559	43.214
8	Penajam Paser Utara	-	2.499	-	-	2.499
<b>Jumlah Total</b>		<b>56.207</b>	<b>102.587</b>	<b>5.543</b>	<b>83.631</b>	<b>247.968</b>

*Sumber* : Target perhutanan sosial (Pencadangan, Potensi dan Indikatif) di Kalimantan Timur s.d **2023** seluas 247.968 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arahkan Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi VI).

Realisasi Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Tahun 2023 sebesar 287.068 hektar dengan 137 Unit, yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 246.733 hektar sebanyak 60 Unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 15.693 hektar sebanyak 52 Unit, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 16.215 hektar sebanyak 18 Unit, dan Kemitraan Kehutanan seluas 630 hektar sebanyak 5 Unit. Sedangkan realisasi Hutan Adat seluas 7.770,85 Ha sebanyak 2 Unit. Rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I-3. Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur**

NO.	KABUPATEN	JUMLAH					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	BALIKPAPAN	-	11	-	-	-	-	1.897	-	-	-	11	1.897
2	BERAU	17	1	1	3	-	97.287	119,21	1.096	425	-	22	98.927
3	KUTIM	5	6	10	1	-	24.945	3.136	10.556	109	-	22	38.772
4	KUKAR	16	30	4	-	-	55.004	8.575	3.574	-	-	50	67.153
5	KUBAR	8	-	3	-	1	27.204	-	989	-	48,85	12	28.242

NO.	KABUPATEN	JUMLAH					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
6	MAHAKAM ULU	12	-	-	1	-	40.743	-	-	96	-	13	40.839
7	PASER	2	3	-	-	1	1.550	361	-	-	7.722	6	9.633
8	PPU	-	1	-	-	-	-	1605	-	-	-	1	1.605
JUMLAH TOTAL KALTIM		60	52	18	5	2	246.733	15.693	16.215	630	7.770,85	137	287.068

Sumber : Perkembangan perhutanan sosial di Kalimantan Timur s.d 2023 per kabupaten/kota.

### 3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar. Seluas 174.971,43 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 99.985,53 hektar sangat kritis.

**Tabel I-4. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan**

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kalimantan Timur	7.071.383,48	174.971,43	3.616.252,12	99.985,53	1.768.969,81	12.731.562,37
<b>Total</b>						<b>12.731.562,37</b>

Sumber: SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

**Tabel I-5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2023**

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALIMANTAN TIMUR	Bearu	1.120,18
2.		Kutai Timur	30.268,76
3.		Kukar	3.480,57
4.		Kubar	2.824,41
5.		Mahakam Ulu	427,12
6.		Bontang	-
7.		Balikpapan	63,00
8.		PPU	250,00
9.		Paser	427,12
10.		Samarinda	-
<b>JUMLAH</b>			<b>38.861,16</b>

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, belum tersedianya dana pendamping dari APBD untuk mendukung kegiatan RHL yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) DR. Hal ini berpotensi menurunnya realisasi kegiatan RHL di Kaltim. Hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat

diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

#### **4. Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya**

Untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

##### *a) Kebakaran Hutan*

Dibawah ini, dimana Pada Tahun 2016 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 280 titik hotspot, Tahun 2017 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 335 titik hotspot, Tahun 2018 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 1.023 titik hotspot, Tahun 2019 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 2.418 titik hotspot, Tahun 2020 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 295 titik hotspot, Tahun 2021 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP, Terra / Aqua, dan Landsat yaitu 136 titik hotspot, serta Tahun 2022 terdeteksi Pada Satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua yaitu 17 titik hotspot, dan pada tahun 2023 terdeteksi melalui satelit NOAA, SNPP, Terra, dan Aqua terdeteksi 922 Titik Api. Dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

**Tabel I-6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2016 s/d Tahun 2023**

Tabel Sebaran Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur														
Tahun	Bulan												Total	Satelit
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
2016	-	-	-	-	-	1	8	26	14	19	13	2	83	NOAA
	-	-	-	18	9	1	7	17	22	8	1	1	84	SNPP Lapan
	-	-	-	32	12	3	10	35	14	-	7	-	113	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>280</b>	
2017	-	5	3	4	5	1	7	31	30	29	-	4	119	NOAA
	-	2	1	1	2	-	2	29	44	31	-	-	112	SNPP Lapan
	-	-	-	2	1	1	3	20	42	34	1	-	104	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>116</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>335</b>	
2018	1	5	11	3	12	12	9	38	181	38	3	2	315	NOAA
	-	-	1	3	2	2	5	56	150	91	5	6	321	SNPP Lapan
	-	-	1	3	1	1	6	81	217	63	4	10	387	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>175</b>	<b>548</b>	<b>192</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>1023</b>	
2019	1	18	26	7	4	-	10	76	316	69	7	-	534	NOAA
	1	13	10	4	4	3	3	40	570	156	54	1	859	SNPP Lapan
	2	11	8	5	-	-	9	91	751	113	34	1	1025	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>207</b>	<b>1637</b>	<b>338</b>	<b>95</b>	<b>2</b>	<b>2418</b>	
2020	1	-	-	2	-	-	-	4	9	6	-	-	22	NOAA
	1	-	9	1	1	-	2	38	16	5	4	-	77	SNPP Lapan
	9	6	17	10	5	-	-	83	37	19	10	-	196	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>125</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	
2021	-	-	1	-	-	-	-	3	3	3	1	-	11	NOAA
	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	-	-	8	SNPP Lapan
	-	1	-	-	-	-	3	8	15	8	1	-	36	Terra / Aqua Lapan
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	Landsat
2022	2	10	13	3	4	7	4	15	27	47	2	2	136	
	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	1	7	NOAA
	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	-	1	9	SNPP
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	
2023	-	-	-	1	4	-	20	56	79	75	4	-	239	NOAA
	-	1	-	2	1	4	8	49	93	66	10	-	234	SNPP
	-	1	3	1	5	1	30	85	186	118	18	1	449	Terra
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>190</b>	<b>358</b>	<b>259</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>922</b>	Aqua

Dari data sebaran hotspot diatas digambarkan perubahan sebaran hotspot pertahun dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga bisa menurun dan meningkat, Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) *Ilegal logging/perambahan*

Sampai dengan saat ini pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini tidak terlepas dari kurangnya tenaga Polisi Kehutanan yang salah satu tugasnya adalah melakukan patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan guna mencegah dan membatasi kegiatan perusakan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 20 (dua puluh) UPTD KPHP/KPHL/Tahura hanya memiliki 54 (lima puluh empat) ASN yang berkualifikasi sebagai Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, maka masih terdapat beberapa UPTD KPHP yang belum memiliki tenaga Fungsional Polisi Kehutanan.

Jumlah Polisi Kehutanan tersebut tentu saja belum sebanding dengan luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur 8.371.478,05 ha. (sesuai SK no: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Prov. Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021).

Data kerusakan hutan tahun 2023 karena Illegal Logging dan Perambahan hutan di wilayah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 12.927,73 Ha.

Namun demikian upaya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan tetap dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Patroli Mandiri (tanpa anggaran) yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan secara bersamaan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan Seluruh UPTD KPHP/L, patroli pengamanan hutan mulai intensif dilaksanakan pada September s/d Desember 2023.

Hal lain yang dilaksanakan adalah mendorong profesionalisme SDM sehingga mampu menangani perkara-perkara *Illegal Logging*, memberikan keterangan ahli dan penanganan pelanggaran administrasi kehutanan.

Data kerusakan hutan/kawasan hutan selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I-7. Data Kerusakan Hutan Tahun 2023**

NO	UPTD KPHP/L & TAHURA	ILLEGAL LOGING (Ha)	PERAMBAHAN (Ha)	TOTAL
1	Berau	57,41	590,16	647,56
2	Kutai Timur	83,91	10.000,36	10.084,27
3	Bontang	-	56,00	56,00
4	Samarinda	-	-	-
5	Kutai Kartanegara	-	460,00	460,00
6	Balikpapan	-	2,94	2,94
7	PPU	4,70	859,00	863,70
8	Paser	-	213,32	213,32
9	Kutai Barat	120,63	477,31	597,94
10	Mahulu	-	2,00	2,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>266,65</b>	<b>12.661,08</b>	<b>12.927,73</b>

Salah satu upaya guna menekan laju kerusakan hutan dan kawasan hutan adalah dengan menambah jumlah tenaga polisi kehutanan sebagaimana yang di butuhkan sesuai analisis jabatan sebanyak 408 (empat ratus delapan) personil dari berbagai tingkatan kepangkatan untuk seluruh wilayah hutan dan kawasan hutan di Kalimantan Timur. Sementara jumlah personil saat ini adalah 54 (lima puluh empat) personil sehingga masih kekurangan tenaga polisi kehutanan sekitar 354 (tiga ratus lima puluh empat) personil.

Hal tersebut tentunya perlu adanya anggaran yang cukup guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembentukan polisi kehutanan. Selain itu sarana dan prasarana perlindungan hutan juga perlu ditingkatkan seperti kendaraan patroli, radio komunikasi, *drone* dan lain-lain yang mendukung kegiatan pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan target penurunan kerusakan hutan dan kawasan hutan dapat tercapai.

## G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2023 dengan garis besar rincian :

**Tabel I-8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2023**

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	9.000	M <sup>2</sup>
2	Gedung	5 / 5580,25	Unit/M <sup>2</sup>
3	Listrik	2	Induk/jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Ruang Rapat	2	Ruang
6	Koperasi	-	Buah
7	Alat alat Besar	705	Set
8	Alat-alat Angkutan	197	Unit
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur	422	Unit
10	Alat Pertanian	12	Buah
11	Alat kantor dan Rumah tangga	1.712	Unit
12	Alat Studio dan Alat komunikasi	270	Unit
13	Alat-Alat kedokteran	31	Unit
14	Alat Laboratorium	287	Unit
15	Alat-alat persenjataan dan Pengamanan	5	Unit

Sumber : Data SIMDA BMD 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

##### **1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan<sup>1</sup>. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**“Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah”**

##### **2. Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah<sup>2</sup>. Sasaran yang akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**“Meningkatkan Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan”**

---

*Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.*

Tabel II-1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (P-Renstra 2019-2023)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB (%)	Meningkatkan Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBPN sektor Kehutanan

### 3. Anggaran

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 623.306.499.397,- Pada Tahun 2023.

### 4. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi<sup>3</sup>.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program yang dilaksanakan pada periode tahun 2019 - 2023 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) dan Dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) adalah meliputi program sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel II-2. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	Meningkatkan Penerimaan PNBPs Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBPs Sektor Kehutanan	Rp (miliar)	185	190	125	125	125

Tabel II-3. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Penerimaan PNBPs Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBPs sektor Kehutanan	M	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> </ol>
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ol>
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>7. Penyediaan Bahan/Material</li> <li>8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Mebel</li> <li>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya</li> <li>4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>
					Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan</li> <li>2. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH</li> </ol>
						Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
						Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi</li> <li>2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung</li> <li>3. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH</li> <li>5. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan</li> </ul>
						Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)</li> <li>2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara</li> <li>3. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara</li> <li>4. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan</li> <li>5. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan</li> </ul>
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan</li> <li>2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan</li> <li>3. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan</li> <li>4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan</li> <li>5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati</li> <li>2. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya</li> </ul>
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
						Perbenihan Tanaman Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar</li> <li>2. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit</li> </ul>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi  Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi  Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1. Pencegahan, Penganggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 2. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi  1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES  1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
					Program Pendidikan dan Pelatihan, penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 3. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel II-4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan	Realisasi Produksi hasil hutan kayu yang bersumber dari hutan alam, hutan tanaman/kemasyarakatan dan hasil hutan dari ijin sah lainnya berpengaruh besar terhadap Penerimaan PNBPN sektor kehutanan	Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan (PSDH, DR, dan IIUPH)	BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Sasaran Strategis)

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Jumlah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Rp (miliar)	125 M

Tabel II-6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Program)

Program	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Alokasi Anggaran
Pengelolaan Hutan	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	5.050.000	M3	246.750.861.972
	Realisasi Produksi Hasil Hutan Buka Kayu	730	Ton	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1	%	12.999.911.900
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	Ha	78.449.735.933
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14	%	3.578.275.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84	%	281.527.714.592

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

Tabel III-1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21,60
2	Pengukuran Kinerja	20 %	13,20
3	Pelaporan Kinerja	10 %	5,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20 %	12,20
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20 %	15,20
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>			<b>68,10</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	<b>a) perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, menggunakan cascading di setiap level secara logis, serta memperhatikan crosscutting</b>	
	- IKU seharusnya menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).	pada tahun 2024 memasuki periode renstra baru sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perubahan indikator terhadap IKU.
	<b>b) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.</b>	

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seharusnya terdapat perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya berupa dokumen/catatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah menunjukkan adanya reviu atau perbaikan dokumen perencanaan kinerja terhadap memperbaiki capaian kinerja sebelumnya.</li> </ul>	<p>dokumen perencanaan kinerja akan terus dilakukan perbaikan secara berkala dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon III dan IV (laporan ditandatangani oleh pejabat bersangkutan).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seharusnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berupa dokumen/catatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah menunjukkan adanya reviu atau perbaikan dokumen perencanaan kinerja untuk menunjukkan kondisi/hasil yang lebih baik.</li> </ul>	<p>pengumpulan dokumen perencanaan kinerja akan terus dilakukan perbaikan secara berkala dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon III dan IV (laporan ditandatangani oleh pejabat bersangkutan).</p>
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
	<p><b>a) pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data kinerja yang dikumpulkan seharusnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.</li> </ul>	<p>pengumpulan kinerja akan terus dilakukan perbaikan sehingga informasi mengenai kinerja lebih dapat diandalkan maka dinas kehutanan provinsi kalimantan timur telah menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon agar setiap informasi kinerja dilampiri dengan bukti.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data kinerja yang dikumpulkan seharusnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</li> </ul>	<p>melakukan evaluasi baik pelaporan, kinerja ataupun kegiatan secara berkala.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- setiap level organisasi seharusnya melakukan pemantauan atas pengukuran</li> </ul>	<p>melakukan evaluasi baik pelaporan, kinerja ataupun kegiatan secara</p>

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.	berkala.
	<b>b) pengukuran kinerja telah dijadikan dalam dasar pemberian reward and punishment.</b>	
	- pengukuran kinerja seharusnya dijadikan dasar pemberian reward and punishment, serta penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.	dinas kehutanan provinsi kalimantan timur telah memanfaatkan hasil informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian reward kepada pejabat yang berhasil mencapai target pencapaian kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah dibuat.
	- pengukuran kinerja seharusnya dijadikan dasar pengusulan penyesuaian (recofusing) organisasi.	
	- pengukuran kinerja seharusnya dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi/langkah-langkah dalam mencapai kinerja.	
	- pengukuran kinerja seharusnya dijadikan dasar untuk penyesuaian kebijakan dan aktivitas/kegiatan dalam mencapai kinerja.	
	- pengukuran kinerja seharusnya dijadikan dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	
	- seharusnya terdapat efesiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	
	- setiap bidang/sub bidang/level program/kegiatan seharusnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	setiap kepala bidang/sub bidang ikut memonitoring terhadap capaian kinerja masing-masing pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian reward and punishment.

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- setiap pegawai seharusnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</li> </ul>	<p>memonitoring terhadap capaian kinerja masing-masing pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian reward and punishment.</p>
<b>3.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	<p><b>a) terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan dokumen laporan kinerja seharusnya disusun secara berkala.</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen laporan kinerja seharusnya disusun secara berkala</li> </ul>	<p>berdasarkan hasil pelaporan kinerja dinas kehutanan provinsi kalimantan timur akan menginstruksikan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV dalam evaluasi capaian kinerja secara berkala agar dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga dari hasil evaluasi dapat meningkatkan kinerja baik dalam program maupun kegiatan</p>
	<p><b>b) Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dokumen laporan kinerja seharusnya :</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya</li> </ul>	<p>Dinas Kehutanan Prov Kaltim telah melakukan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dan tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKJIP.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya</li> </ul>	

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</li> </ul>	<p>menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)</li> </ul>	<p>Dinas Kehutanan Prov Kaltim akan menggunakan informasi kinerja untuk memperbaiki Perencanaan penilaian pelaksanaan Program Kegiatan</p>
	<p><b>c) pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjadi perhatian utama pemimpin</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjadi kepedulian seluruh pegawai</li> </ul>	<p>dinas kehutanan akan menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup dinas kehutanan dan UPTD untuk ditindaklanjuti</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi</li> </ul>	
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Evaluasi Internal</b></p>	
	<p><b>a) evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan rekomendasi perbaikan</li> </ul>	<p>dinas kehutanan akan menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup dinas kehutanan dan UPTD</p>

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		untuk ditindaklanjuti
	- menunjukkan perbaikan setiap periode	akan melakukan monitoring dan evaluasi serta pemantauan terhadap kinerja/kegiatan secara berkala setiap bulan guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya
	- menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	dinas kehutanan sudah mengusulkan pembuatan aplikasi SAKIP khusus lingkup dinas kehutanan yang dianggarkan tahun berikutnya.
	<b>b) implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja</b>	
	- menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	dinas kehutanan akan menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup dinas kehutanan dan UPTD untuk ditindaklanjuti
	- meningkatkan nilai implementasi SAKIP atas komponen penilaian	berdasarkan hasil evaluasi nilai implementasi SAKIP agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan menginstruksikan seluruh pejabat eselon untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penilaian SAKIP
	- meimplementasikan hasil tindak lanjut evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja (perencanaan selanjutnya)	melakukan pemantauan evaluasi dalam rangka pengendalian kinerja secara berkala setiap bulannya melalui laporan capaian kinerja pejabat eselon III dan IV
	- hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	berdasarkan hasil evaluasi nilai implementasi SAKIP agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan menginstruksikan seluruh pejabat eselon untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		penilaian SAKIP
	- memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	berdasarkan hasil evaluasi nilai implementasi SAKIP agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan menginstruksikan seluruh pejabat eselon untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penilaian SAKIP
<b>5.</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
	<b>a) agar capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya</b>	dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
2	3	4	5	6	7	8	$9=8/7*100$
<b>Meningkatkan Penerimaan PNBPNBP Sektor Kehutanan</b>	<b>Jumlah Penerimaan PNBPNBP Sektor Kehutanan</b>	<b>Rp (M)</b>	<b>125 M</b>	Triwulan I	31.250.000.000	27.896.633.350	89,27%
				Triwulan II	31.250.000.000	27.896.633.350	89,27%
				Triwulan III	31.250.000.000	65.092.145.000	208,29%
				Triwulan IV	31.250.000.000	133.416.778.605	426,93%

## C. Analisis Capaian Kinerja

**Sasaran : Meningkatkan Penerimaan PNBPNBP Sektor Kehutanan**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	$5=4/3*100$
1.	Jumah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Rp	125.000.000.000	272.627.421.133	218,10%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	$5=4/3*100$
<b>Jumah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan</b>	<b>Rupiah</b>	224.077.573.976	272.627.421.133	121,67%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	% Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	$5=3/4*100$
Jumah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Rp	272.627.421.133	125.000.000.000	218,10%

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan** dengan indikator Jumlah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan (Rp) dapat diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan, diantaranya adalah :

- a. Faktor realisasi produksi hasil hutan kayu, sebagaimana berikut:
  - Realisasi produksi hasil hutan kayu dari Hutan Alam (realisasi Tahun 2022 sebesar 1.049.135,07 m<sup>3</sup> dan realisasi Tahun 2023 sebesar 743.025,73 m<sup>3</sup>), produksi ini mengalami penurunan.
  - Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman / Kemasyarakatan (realisasi Tahun 2022 sebesar 3.205.071,30 m<sup>3</sup> dan realisasi Tahun 2023 sebesar 4.611.834,48 m<sup>3</sup>). Produksi ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
  - Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu dari ijin sah lainnya (realisasi Tahun 2022 sebesar 216.253,74 m<sup>3</sup> dan realisasi tahun 2023 sebesar 194.343,00 m<sup>3</sup>). Produksi ini mengalami penurunan.

Secara keseluruhan bahwa produksi kayu mengalami kenaikan terutama pada produksi hasil hutan kayu Hutan Tanaman.

- b. Faktor realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu mengalami peningkatan realisasi produksi sebesar 23,37 % dari 826,05 Ton pada tahun 2022 dan 1.078 Ton pada tahun 2023, hal ini disebabkan adanya penetapan regulasi Sistem Informasi PUHHBK (Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu) pada unit manajemen.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-7. Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	218,10%	87,30%	130,80

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis pada RPJMD adalah dengan Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah dengan indikatornya yaitu Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB, di dukung oleh beberapa Program Kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) dan Dana FCPF-CF antara Lain di antaranya sebagaimana tertera dalam penjelasan dibawah ini:

**Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:**

- a. Dua Program yang mencapai capaian kinerja 100 % yaitu program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Hutan mencapai 109,89 % pada Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu dan 147,67% pada indikator Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar 101,38 %, dan Program Pengolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 100,86 %.
- b. Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator Persentasi Kerusakan Hutan diDalam Kawasan Hutan mengalami perbaikan, rasio pencapaian realisasi sebesar 0,17 % dari 1 % target yang ingin dicapai, artinya dalam hal ini gangguan kerusakan hutan mengalami penurunan. Penyebab keberhasilan didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
  - Faktor Alam (Cuaca) ditahun 2023, curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan kelembapan dan mempengaruhi mengurangi tingkat kekeringan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara intensif melakukan kegiatan patroli pencegah kebakaran hutan dan lahan.
  - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan serta melibatkan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun Masyarakat Mitra Polhut (MMP).
- c. Pada Program Pengelolaan Hutan dengan Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), meliputi 8 (Delapan) kegiatan dengan pencapaian kinerja bervariasi.
- d. Keberhasilan pada program-program yang bersumber dari APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta DBH SDA DR Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target pada tahun 2023 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil XI, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang PBPH dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

**Solusi alternatif Penyelesaian Masalah:**

- a. Penyusunan Rancangan Teknis pada kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan pada kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan lebih awal.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
- c. Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan dengan pengembangan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.
- d. Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Tabel III-8. Capaian Progam dan Kegiatan Tahun 2023

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>DINAS KEHUTANAN</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	68	97,14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	376	373	99,20%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	Unit	39	39	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	2	7	350,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	Ha	1.611.386	906.533	56,26%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	475	475	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	6	6	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	UM	13	13	100,00%
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pederangan benih dan bibit terdaftar	Lap;Sertf;Unit Usaha	138	156	113,04%
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	1	0,17	100,00%
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	6.000	6.000,00	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	15	15	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%	14	14,12	100,86%
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	Laporan	17	17	100,00%
<b>UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik	Unit	14	14	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	daerah penunjang pemerintah daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	85	85	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	1	0,17	100,00%
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	Ha	64.864	64.864,00	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	8	8	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	14	7	50,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	30	30	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	3	3	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	Ha	110.790	78.195,00	70,58%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha	100	67	67,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	3	3	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	2	2	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	29	29	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	29	29	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	5	5	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	93.859	93.859	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	6	6	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	Unit	1	1	100,00%
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pendedaran benih dan bibit terdaftar	Unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	4	4	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	2	16,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	6	6	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	77	49	63,64%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	2	200,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	21.362	17.500	81,92%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	50	200	400,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan	Laporan	10	10	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
di Bidang Kehutanan	pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan				
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	82,3	97,98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	60	60	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	41	41	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	Ha	137.495	137.495,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Ha	50	50	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Unit	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	10	10	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	2	2	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	267.068	267.068,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	57	57	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	-	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	Ha	32.000	32.441,00	101,38%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Masyarakat (Ha)				
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	10	10	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	15	12	80,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	272.566	272.566,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	100	90	90,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pagedaran benih dan bibit terdaftar	Lap;Sertf;Unit Usaha	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	3	3	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon</b>			-		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	1	1	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	33	33	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	641.969	530.354	82,61%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	400	400	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	8	8	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1	1	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit	Unit	6	6	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	25	25	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	69.911	69.911,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	40	40	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Unit	1	0	0,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	2	2	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara			-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	98,78	117,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	16	16	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	32	32	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	312.160	231.057	74,02%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	35	35	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	Unit Manajemen	1	1	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	3	3	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH UN	Unit	45	45	100,00%
	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	45	45	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	11	11	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	301.650	301.650,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	50	65	130,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Unit	1	1	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	4	4	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	86,28	102,71%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	11	91,67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	15	13	86,67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	3	3	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	Dokumen	3	2	66,67%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	132.335	132.335,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	27	23	85,19%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	5	4	80,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	79	75	94,94%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	66	66	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	Dokumen	3	3	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan	jumlah rehabilitasi di luar kawasan	Ha	75	75	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Hutan Negara	hutan				
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Laporan	2	2	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	80,32	95,62%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	8	8	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	32	32	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	94.000	94.000,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	260	260	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	3	3	100,00%
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	UM	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	8	8	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	83,15	98,99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	10	10	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	1	1	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	37.578	37.578,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	100	100	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	1	0,17	100,00%
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP	Laporan	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	8	8	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	25	25	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BULAN	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	13	13	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	2	2	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	3	3	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	132.792	72.148,00	54,33%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	173	60	34,68%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	-	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Laporan	32	32	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	66	66	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	40	40	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	2	2	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	85.751	85.751,00	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	95	85	89,47%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	-	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	12	12	100,00%
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	81	81	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	44	44	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2	2	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	Ha	96.298	96298	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	Ha	124	124	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	Kasus	3	3	100,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>					
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	Laporan	15	15	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	80	95,24%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	31	31	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	31	31	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	1	1	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	350	350	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	1	100,00%
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pederaran benih dan bibit terdaftar	Lap;Sertf;Unit Usaha	1	1	100,00%
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	%	1	0,17	100,00%
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)	Laporan	1	1	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Laporan	4	4	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	%	13	14,12	108,62%
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	4	4	100,00%
<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	%	84	84	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	Laporan	12	12	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1	1	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan	Bulan	12	12	100,00%

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	Unit	30	1	3,33%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	Unit	2	2	100,00%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.050.000	5.549.203,21	109,89%
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	730	1.078,00	147,67%
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	Dokumen	2	2	100,00%
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	Dokumen	2	2	100,00%
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	25	25	100,00%
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	Ha	15	15	100,00%
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	Kasus	2	2	100,00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	32.441,00	101,38%
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Laporan	7	7	100,00%

## D. Realisasi Anggaran

Tabel III-9. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu	5.050.000	5.549.203,21	109,89%	246.750.861.972,00	216.025.658.262,00	87,55%
		Realisasi Produksi Hasil Hutan Buka Kayu	730	1.078,00	147,67%			
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1	0,17	100,00%	12.999.911.900,00	11.808.271.835,00	90,83%
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000	32.441,00	101,38%	78.449.735.933,00	71.824.861.267,00	91,56%

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14	14,12	100,86%	3.578.275.000,00	3.511.779.037,00	98,14%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84	84	100,00 %	281.527.714.592,00	241.003.377.265,00	85,61%

Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1. Produksi Hasil Hutan Kayu</b>	<b>246.750.861.972</b>	<b>216.025.658.262</b>	<b>87,55%</b>
		<b>2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>			
	<b>Kegiatan:</b>				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	66.520.113.183,00	58.779.247.782,00	88,36%
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	8.781.484.150,00	8.136.309.882,00	92,65%
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	22.517.800.800,00	19.706.422.388,00	87,51%
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	74.368.043.371,00	65.422.856.152,00	87,97%
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan hasil Hutan Bukan Kayu	60.047.880.688,00	51.342.000.554,00	85,50%
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	6.075.468.300,00	5.440.697.740,00	89,55%
	Pelaksanaan Pengolahan hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada Unit pengelolaan hasil hutan kayu	2.379.232.000,00	2.121.331.767,00	89,16%
	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	6.060.839.480,00	5.076.791.997,00	83,76%
2	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan</b>	<b>12.999.911.900</b>	<b>11.808.271.835</b>	<b>90,83%</b>
		<b>Kegiatan</b>			
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	10.904.731.800,00	9.807.628.814,00	89,94%
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species)	100.000.000,00	93.950.700,00	93,95%
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1.995.180.100,00	1.906.692.321,00	95,56%
3	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN</b>	<b>Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat</b>	<b>78.449.735.933</b>	<b>71.824.861.267</b>	<b>91,56%</b>

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	%
	<b>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>				
	<b>Kegiatan</b>				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	78.449.735.933	71.824.861.267	91,56%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Persentase Tutupan Lahan Meningkat</b>	<b>3.578.275.000</b>	<b>3.511.779.037</b>	<b>98,14%</b>
	<b>Kegiatan</b>				
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota	3.578.275.000,00	3.511.779.037,00	98,14%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>281.527.714.592</b>	<b>241.003.377.265</b>	<b>85,61%</b>
	<b>Kegiatan:</b>				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.177.036.000,00	2.121.077.145,00	97,43%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	105.659.146.187,00	101.528.295.635,00	96,09%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.024.293.100,00	986.522.924,00	96,31%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	4.426.356.000,00	4.065.073.347,00	91,84%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.310.486.540,00	19.600.511.144,00	96,50%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	111.065.674.224,00	78.317.425.354,00	70,51%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.836.715.361,00	21.613.133.076,00	94,64%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	14.028.007.180,00	12.771.338.640,00	91,04%
<b>TOTAL</b>			<b>623.306.499.397</b>	<b>544.173.947.666</b>	<b>87,30%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur "**Berhasil**" mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan dengan indikator Jumlah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan tercapai Rp 272.627.421.133,- dari target Rp 125.000.000.000,- dengan rasio capaian sebesar 218,10%.
2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi Kinerja produksi hasil hutan kayu 109,89% dan realisasi kinerja hasil hutan bukan kayu 147,67%, realisasi keuangan 87,55%) dengan Kegiatan:
    - 1) Pengelolaan rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (realisasi keuangan 88,36%);
    - 2) Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) (Realisasi keuangan 92,65%);
    - 3) Pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (realisasi keuangan 87,51 %);
    - 4) Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara (realisasi keuangan 87,97 %);

- 5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (realisasi keuangan 85,50%);
  - 6) Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) (realisasi keuangan 89,55%)
  - 7) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun (realisasi keuangan 89,16%)
  - 8) Perbenihan tanaman hutan (realisasi keuangan 83,76%)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (realisasi kinerja 100 %, realisasi keuangan 90,83 %) dengan kegiatan:
- 1) Pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Provinsi (realisasi keuangan 89,94%);
  - 2) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (realisasi keuangan 93,95%)
  - 3) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (realisasi keuangan 95,56%);
- c. Program Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan (realisasi kinerja 101,38%, realisasi keuangan 91,56%);
- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (realisasi keuangan 98,14%);
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (realisasi fisik 100,86%, realisasi keuangan 98,14%);
- 1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) (realisasi keuangan 98,14%);

3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pelaksanaan dilapangan, beberapa hal yang menjadi catatan adalah :
  - Penyusunan Rancangan Teknis pada kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan pada kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan lebih awal.
  - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
  - Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan dengan pengembangan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.
  - Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

**B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya**

1. Dengan terbentuknya 20 Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, maka diharapkan kepada UPTD KPH untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan hutan secara lestari yang berlandaskan pada aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.
2. Membangun komunikasi dan melakukan pembinaan terhadap mitra – mitra kerja (IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM, KTH dan Masyarakat sekitar hutan) di dalam wilayah kerja UPTD KPH masing-masing.

3. Perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi data dari Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola dan didesain dengan baik sehingga menjadi pedoman dan acuan dalam merencanakan kegiatan, mempermudah dalam pengawasan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
4. Mendorong peningkatan kinerja ASN terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap tujuan sasaran strategis kebijakan Kehutanan.